

DPD

Antara Harapan
& Kenyataan



DPD
“Antara Harapan dan Kenyataan”

Dr. H. Subardjo, SH., M.Hum

KATA PENGANTAR

Salah satu perubahan penting dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945 adalah pembentukan lembaga negara baru, yaitu Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Pembentukan DPD tujuan awalnya adalah untuk mengikutsertakan daerah dalam setiap keputusan politik nasional. Untuk mewujudkan tujuan itu satu-satunya jalan adalah merubah sistem unikameral menjadi sistem bikameral yaitu bikameral yang murni.

Keberadaan DPD tersebut telah membangkitkan harapan masyarakat di daerah bahwa kepentingan daerah dan masalah-masalah daerah dapat diangkat dan diperjuangkan ditingkat nasional. Namun harapan itu menjadi pudar setelah DPD mengalami proses politik di MPR, dimana fraksi-fraksi ada yang setuju DPD diberi kewenangan yang sama dengan DPR tetapi sebaliknya ada yang tidak setuju DPD diberi status sebagai lembaga legislatif, dan bahkan akhirnya semua fraksi melalui kompromi politik setuju DPD diberi kewenangan terbatas. Dengan kewenangan terbatas itulah yang sampai hari ini menimbulkan perdebatan / kontroversial di kalangan masyarakat terutama para politisi, praktisi, maupun akademisi yang ujung-ujungnya mengarah kepada amandemen kelima UUD 1945.

Pada saat ini hasil amandemen UUD 1945 diakui atau tidak berada dalam wilayah teori bikameral, tetapi bikameral yang tidak murni, karena kewenangan DPD tidak sama dengan DPR khususnya dibidang legislasi.

Kedepan prospek DPD dalam lembaga perwakilan sistem bikameral harus semakin jelas dan tegas menjadi sistem bikameral yang murni dengan menata fungsi legislasi DPD dan lembaga terkait seperti MPR, DPR dan Presiden. Selain menata ulang fungsi legislasi juga menata ulang struktur lembaga perwakilan yang tidak jelas, karena secara formal dapat bersifat bikameral karena MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD, secara struktur bersifat trikameral karena ada MPR, DPR, dan DPD yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri dan mempunyai kewenangan sendiri-sendiri, tetapi secara praktis dapat disebut unikameral karena kewenangan penuh legislasi ada di DPR.

Harapan kedepan Lembaga Perwakilan di Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah menjadi lembaga perwakilan dengan sistem bikameral murni dengan merubah beberapa pasal dalam UUD 1945 seperti pasal 2 ayat (1), pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat 1-5, pasal 22D ayat 1, 2, 3 dan diproses sesuai aturan main UUD 1945.

Terkait dengan terbitnya buku ini penulis telah mencoba mengkaji fungsi dan kewenangan DPD dalam Undang-Undang Dasar 1945, dan mencoba memberikan solusinya lewat amandemen seri kedua atau amandemen kelima karena titik lemah DPD ada pada konstitusi bukan pada Undang-Undang Organiknya.

Yogyakarta, 1 Juni 2008

Dr. H. Subardjo, S.H., M. Hum.

ISBN: 978-979-3812-12-0

Judul : DPD "Antara Harapan dan Kenyataan"
Penulis : Dr. H. Subardjo, SH. M.Hum.

Editor : Meyrina Lani Anggapuspa
Desain Cover : Fajar Kurniawan
Tata Letak : Fajar Kurniawan

DINI Mediapro
Jl. Pleret Km. 2 Potorono
Banguntapan Bantul Yogyakarta
Telp. 0274-7481526

Cetakan Pertama, Juni 2008

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i	a. Teori Mandat	49
KATA PENGANTAR.....	ii	b. Teori Organ	50
DAFTAR ISI.....	iii	c. Teori Sosiologi	50
		d. Teori Hukum Obyektif	50
BAB I		3. Sifat Lembaga Perwakilan	52
PENDAHULUAN	1	4. Macam-Macam Lembaga Perwakilan	52
		a. Sistem Satu Kamar (Unikameral)	53
BAB II		b. Sistem Dua Kamar (Bikameral)	53
DEMOKRASI DAN LEMBAGA PERWAKILAN BIKAMERA	11	5. Fungsi Lembaga Perwakilan	54
A. ..Paham Demokrasi Pada Umumnya	11	E. Lembaga Perwakilan Bikameral	54
1. Pengertian Umum	11		
2. Macam-Macam Demokrasi.....	13	BAB III	
a. Demokrasi Langsung	13	LEMBAGA PERWAKILAN PARLEMEN BIKAMERAL	
b. Demokrasi Tidak Langsung (Liberal Kapitalis).....	13	DI INDONESIA DAN PENUANGAN DPD DAN DPR DALAM	
c. Demokrasi Rakyat (Marxis Leninis)	14	PERUBAHAN UUD 1945	58
d. Demokrasi Parlementer	14		
e. Demokrasi Presidensiil	14	A. Bikameralisme di Indonesia	58
f. Demokrasi Konstitusional	15	1. Bikameralisme Menurut Konstitusi RIS 1949-1950	58
3. Sejarah dan Perkembangan Demokrasi di Barat.....	15	a. Sistem Pemerintahan Republik Indonesia	
4. Sejarah dan Perkembangan Demokrasi di Indonesia	19	1949-1950	58
a. Demokrasi pada periode 1945-1949.....	19	b. Kamar Kedua atau Senat RIS 1949	59
b. Demokrasi pada periode 1959-1965.....	20	2. Bikameral Menurut Perubahan UUD 1945.....	62
c. Demokrasi pada periode 1965-1998.....	21	a. Wacana Gagasan Bikameralisme	62
d. Demokrasi pada periode 1998-sekarang.....	23	b. Tinjauan Terhadap DPD Hasil Perubahan	
5. Demokrasi Menurut UUD 1945.....	25	Ketiga dan Keempat UUD 1945	70
B. Konstitusi Dalam Penyelenggaraan Negara.....	26	B. Penuangan DPR dan DPD Dalam Perubahan UUD 1945	80
1. Pengertian Konstitusi	26	1. Pengaturan DPR dan DPD dalam Perubahan uUD 1945....	80
2. Nilai Penting Konstitusi Bagi Negara	28	a. Dewan Perwakilan Rakyat	81
3. Klasifikasi Konstitusi.....	30	b. Dewan Perwakilan Daerah	87
C. Pemisahan/Pembagian Kekuasaan Sebagai Realisasi		2. Komposisi Keanggotaan DPR dan DPD Menurut	
Konstitusi	36	Perubahan UUD 1945	94
1. Konsep Pemisahan Kekuasaan	36	a. Susunan dan Kedudukan DPR	96
2. Distribusi Kekuasaan Menurut UUD 1945 Pasca		b. Susunan dan Kedudukan DPD	96
Amandemen	38	3. Mekanisme Pengisian Keanggotaan DPR dan DPD	
3. Kekuasaan dan Kewenangan DPR sebagai		Menurut Perubahan UUD 1945	100
Lembaga Legislatif	41	a. Sistem Rekrutmen DPR	100
4. Kekuasaan dan Kewenangan Presiden sebagai		b. Sistem Rekrutmen DPD.....	100
Lembaga Eksekutif.....	44	4. Fungsi dan Wewenang DPR dan DPD Berdasarkan	
D. Lembaga Perwakilan	48	Perubahan UUD 1945	104
1. Sejarah Lembaga Perwakilan	48	a. Fungsi dan Wewenang DPR	104
2. Teori-Teori Lembaga Perwakilan	49	b. Fungsi dan Wewenang DPD.....	106

BAB IV	
ANALISIS TERHADAP DPD DALAM MAJELIS	
PERMUSYAWARATAN RAKYAT MENURUT PERUBAHAN	
UUD 1945	112
A. Latar Belakang Ditetapkannya DPD dalam Majelis	
Permasyarakatan Rakyat menurut Perubahan	
Undang-Undang Dasar 1945.....	112
1. MPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia	
Sebelum Perubahan Undang-Undang Dasar 1945	112
2. Perdebatan Dalam Menetapkan DPD Sebagai Kamar	
Kedua di Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam	
Rangka Perubahan Undang-Undang Dasar 1945.....	112
B. Pemberian Kewenangan DPD Yang Tidak Sama Dengan	
DPR dalam Perubahan Undang-Undang Dasar 1945.....	123
1. Gambaran Kewenangan Kamar Kedua Parlemen	
Bikameral Diberbagai Negara	123
2. Perdebatan Pemberian Kewenangan Dewan	
Perwakilan Daerah.....	130
3. Tinjauan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah	
Menurut Perubahan UUD 1945.....	130
C. Prospek DPD Dalam Lembaga Perwakilan di Indonesia	
yang Akan Datang	146
1. Kondisi DPD Menurut Perubahan UUD 1945	147
2. Prospek DPD sebagai Lembaga Perwakilan di	
Indonesia yang Akan Datang.....	150
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	150
DAFTAR PUSTAKA	160
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



Subardjo, lahir di Yogyakarta, 3 Desember 1952. Menyelesaikan studi S-1 dari IKIP Negeri Yogyakarta tahun 1979 dengan disiplin ilmu Civics Hukum, lalu beliau pun kuliah di Fakultas Hukum Universitas Widy Mataram dan meraih gelar Sarjana Hukum tahun 1997. Kemudian meraih gelar Master (Program Magister S-2 Ilmu Hukum) di Universitas Islam Indonesia (2001). Beliau juga sudah menyelesaikan Program Doktor (S3) di Program S3 Ilmu Hukum UII Yogyakarta (2008).

Pada tahun 1980, Beliau pernah dipekerjakan sebagai Dosen Negeri Dipekerjakan (DPK) di IKIP Muhammadiyah Yogyakarta. Disamping mengajar, beliau juga pernah menjabat sebagai Pembantu Dekan I FPIPS (1984-1985), Dekan FPIPS (1989-1994), Pembantu Dekan II FKIP (1994-1998) di IKIP Muhammadiyah Yogyakarta. Ketika IKIP Muhammadiyah berubah menjadi Universitas Ahmad Dahlan, tahun 1999-2004 beliau dipercaya menjabat sebagai Pembantu Rektor II Universitas Ahmad Dahlan, dan tahun 2005 lalu beliau dipercaya kembali untuk periode (2004-2008).

Subardjo terhitung sebagai penulis yang produktif. 4 judul buku telah diterbitkannya dalam 2 tahun terakhir, yaitu : Kontroversi Undang-Undang Tanpa Pengesahan Presiden (ISBN: 979-3333-83-9), Pendidikan Kewarganegara Indonesia (ISBN: 997-00000-00-0), Amandemen Undang Undang Dasar 1945 Sebagai Upaya Pemberdayaan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pembentukan Undang Undang (ISBN: 978-979-3812-11-3), dan Dewan Perwakilan Rakyat Menurut perubahan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (ISBN: 978-979-3812-12-0).

Beberapa karyanya juga banyak dimuat dalam Jurnal maupun Surat Kabar, diantaranya: Politik Internasional dalam Islam, dimuat dalam jurnal Sosio Religia terbitan No: ISSN 1412-2367, vol 6 no: 3, tahun 2007 (terakreditasi), Kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pembentukan Undang Undang menurut UUD 1945, dimuat dalam jurnal Hukum : Novelty terbitan No: ISSN: 1412-6834, Vol I No: 1, tahun 2002, Kebijakan Hukum Tentang Pembentukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Pasca Amandemen UUD 1945, dimuat dalam jurnal Hukum Novelty Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan : terbitan No: ISSN 1412-6834, vol 3 No:1, tahun 2006, Kebijakan Hukum Dalam Penyempurnaan Antara Sistem Pemerintahan Presidensiil dan Parlementer dalam Amandemen UUD 1945, dimuat dalam jurnal Hukum terbitan No: ISSN 1412-6834, Vol 2, No: 2, tahun 2006, Hukum Keluarga di Dunia Islam Kontemporer (Melacak Perkembangan Legislasi dan Pembaharuan Materi di Indonesia, Tunisia dan Mesir), dimuat dalam jurnal Hukum Novelty, terbitan No: ISSN 1412-6834, vol 2 No:2, tahun 2005, Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah dalam perspektif Hukum Positif, dimuat dalam jurnal Sosio Religia, terbitan No: ISSN 1412-2367 (Terekreditasi), vol 6, No: 1, tahun 2007.

Subarjo, memiliki seorang istri bernama Hj. Sri Astuti, S.Pd., dan bertempat tinggal di RT 06 RW 34 Ds. XII Sidorejo, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Jl. Wates Km.3,5 Yogyakarta, Telp.0274-378634.

ISBN : 978-979-3812-12-0

dini
MEDIA PRO

ISBN : 978-979-3812-12-0

